



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal **8 Juli 2025**

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : **281** TAHUN 2025  
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025





PEMERINTAH  
KOTA BATAM

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
TAHUN 2025  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 dan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 - 2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program, dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, Juni 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Batam

Dr. Herman Rozie, S.STP., M.Si  
Pen bina Utama Muda  
NIP. 19770512 199612 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-2
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-3
<b>BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 .....	II-1
2.1.1 Realisasi Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .....	II-1
2.1.2 Realisasi Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .....	II-2
2.1.3 Realisasi Program yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .....	II-4
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-13
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup .....	II-13
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD .....</b>	<b>III-1</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Catatan Penting .....	IV-1
4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan .....	IV-1
4.3 Rencana Tindak Lanjut .....	IV-2

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Pencapaian Sampai Dengan Triwulan I 2025.....	II-5
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.....	II-13
Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target, dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.....	III-4

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;

- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1605); dan

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 - 2029 sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 yaitu :

1. Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025**

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sampai dengan Triwulan I 2025
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

##### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB IV PENUTUP**

- 4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
- 4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I**  
**TAHUN 2025**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sampai dengan Triwulan I Tahun 2025**

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut:

**2.1.1 Realisasi Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
  - Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
  - Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab / Kota
    - Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
    - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab / Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan (PPLH)
  - Kegiatan Pembinaan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Subkegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang2an di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
  - Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
  - Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Subkegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
  - Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
    - Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Tingkat Kabupaten/Kota
    - Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

#### UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
    - Subkegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan Kabupaten/Kota
    - Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

#### UPTD TPA TELAGA PUNGGUR

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2.1.2 Realisasi Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

#### DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Kegiatan Administrasi Keuangan
    - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
  - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Program Pengelolaan persampahan
  - Kegiatan Pengelolaan Sampah
    - Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
    - Subkegiatan Pengoperasian Sarana Penanganan Sampah
    - Subkegiatan Penanganan Sampah melalui Pengangkutan
    - Subkegiatan Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Timbulan Sampah
    - Subkegiatan Pengurangan Sampah melalui Pendauran Ulang Sampah

#### UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

#### UPTD TPA TELAGA PUNGGUR

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Program Pengelolaan Persampahan
  - Kegiatan Pengelolaan Sampah
    - Subkegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah

2.1.3 Realisasi Program yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP : Tidak ada
2. UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN : Tidak ada
3. UPTD TPA TELAGA PUNGGUR : Tidak ada

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 dan pencapaian sampai dengan triwulan I dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Pencapaian Sampai Dengan Triwulan I 2025**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)			
1		2	3	4	5	6 = 5/4*100			
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>									
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>			
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Administrasi Keuangan yang Terlaksana</b>	<b>100%</b>			
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/Bulan	93 Orang/Bulan	100
2	11	1	2.02	3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	100
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase admininstrasi umum terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25</b>	
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	0
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2	100
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3	25
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	0 Unit	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	
1					2	3	4	5	6 = 4*100	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	25	
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	25	
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	25	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	25	
2	11	1	2.09	1	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100	
2	11	1	2.09	2	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	100	
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	0 Unit	0	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	0	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>		<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	0	
2	11	2	2.01	6	Penyusunan Kabupaten/Kota	RPPLH	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	0 Dokumen	0
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN</b>	<b>1. IKA</b>	<b>1. 53,42</b>	<b>1. 0</b>	<b>0</b>	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1				2	3	4	5	6 = 5/4*100
				<b>PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>2. IKU 3. ITH</b>	<b>2. 69,52 3. 88,89</b>	<b>2. 0 3. 0</b>	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2.01</b>	<b>Pencegahan dan/atau Lingkungan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pencemaran Kerusakan Hidup</b>	<b>Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
2	11	3	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	0 Dokumen	0
2	11	3	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	0 Dokumen	0
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2.03</b>	<b>Pemulihan dan/atau Lingkungan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pencemaran Kerusakan Hidup</b>	<b>Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
2	11	3	2.03	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	0 Dokumen	0
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>6</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase perizinan yang dibina dan diawasi</b>	<b>70%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
2	11	6	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan</b>	<b>70%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100 Badan Usaha	0 Dokumen	0
2	11	8			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Percentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
2	11	8	2.01		<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup</b>	<b>3 Jumlah</b>	<b>0 Jumlah</b>	<b>0</b>
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	0 Dokumen	0
2	11	9			<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Percentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
2	11	9	2.01		<b>Pemberian Penghargaan</b>	<b>Jumlah pemberian penghargaan</b>	<b>5 Jumlah</b>	<b>0 Jumlah</b>	<b>0</b>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
					<b>Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>lingkungan hidup</b>			
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	0 Entitas	0
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b> <b>0</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa</b>	<b>90%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b> <b>0</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengaduan yang terselesaikan</b>	<b>90%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
2	11	1 0	2.01	4	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	40 Pengaduan	0 Pengaduan	0
2	11	1 0	2.01	6	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	0 Perkara	0
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b> <b>1</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Pengurangan Sampah</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b> <b>1</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Pesentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>100</b>
2	11	1	2.01	7	Penyediaan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	56 Unit	15 Unit	27

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		
1			2	3	4	5	6 = 5/4*100		
		1		Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				
2	11	1	2.01	9	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	140 Unit	140 Unit	100
2	11	1	2.01	12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	310,037 Ton	310,037 ton	100
2	11	1	2.01	18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	1 Laporan	50
2	11	1	2.01	19	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	2600 Ton	2600 ton	100
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	25	
2	11	1	2.05		<b>Administrasi Kepengawainan Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi kepegawaian terlaksana	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 orang	100
2	11	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi umum terlaksana	<b>100%</b>	<b>0%</b>	0
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0
2	11	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	<b>100%</b>	<b>0%</b>	0
2	11	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	8 Unit	0 Unit	0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)			
1			2	3	4	5	6 = 5/4*100			
			Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25</b>		
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	25	
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	25	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25</b>		
2	11	1	2.09	2	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	100	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2.01</b>	<b>Pencegahan dan/atau Lingkungan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pencemaran Kerusakan Hidup</b>	<b>Percentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
2	11	3	2.01	9	Pengeoperasian dan Pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	10 Unit	0 Unit	0	
2	11	3	2.01	15	Pengelolaan Lingkungan Kabupaten/Kota	Laboratorium Hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	10 Laporan	0 Laporan	0

UPTD TPA TELAGA PUNGGUR

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		
1			2	3	4	5	6 = 5/4*100		
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25</b>	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase admininstrasi umum terlaksana	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25</b>	
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	25
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Pengurangan Sampah</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>100</b>	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	Pesentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>100</b>	
2	11	1	2.01	9	Pengeoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	7 Unit	7 Unit	100

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025 - 2029		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2025 TW I		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71	Indeks	<b>0</b>	
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	53,59	Indeks	<b>0</b>	
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	89,62	Indeks	<b>0</b>	
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	70,09	Indeks	<b>0</b>	
5	Persentase Pengelolaan Sampah	Persentase	67,25%	Persentase	<b>0%</b>	
6	Persentase Pengurangan Sampah	Persentase	26%	Persentase	<b>0%</b>	

## 2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, seperti pada kebutuhan pembangunan lingkungan hidup serta tuntutan implementasi pembangunan berkelanjutan/sustainable development.

Kerusakan lingkungan hidup secara global telah berdampak pada perubahan iklim yang menuai berbagai bencana yang mengancam keberlangsungan hidup manusia di masa mendatang, isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dimasa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang menjadi rumusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, yaitu:

1. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
2. Memastikan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

3. Pengurangan laju kerusakan dan pencemaran lingkungan
4. Mengatasi perubahan iklim yang terjadi
5. Keterbatasan daya tampung dan daya dukung lingkungan
6. Rencana Batam Bebas Sampah
7. Penanganan dan Pengelolaan Sampah Laut
8. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik sampah di darat maupun di laut

### **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut:

#### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - 4) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 2) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
  - a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
    - 1) Subkegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
    - 1) Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
    - 2) Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - b. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
    - 1) Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
  - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

- 1) Subkegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
    - 1) Subkegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
  - a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
    - 1) Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
  - a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
    - 1) Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
    - 2) Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
8. Program Pengelolaan Persampahan
  - a. Kegiatan Pengelolaan Persampahan
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
    - 2) Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
    - 3) Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan
    - 4) Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
    - 5) Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah

#### UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
    - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
      - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
      - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
    - a. Kegiatan
      - 1) Subkegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan Kabupaten/Kota
      - 2) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

#### UPT TPA TELAGA PUNGGUR

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- 1) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Program Pengelolaan Persampahan;
  - a. Kegiatan Pengelolaan Persampahan;
    - 1) Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah.

Adapun program dan kegiatan sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target, dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025**

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11	
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>								<b>103,029,833,191</b>	<b>147,238,071,303</b>	<b>44,208,238,112</b>		
<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>								<b>95,399,649,271</b>	<b>138,043,023,883</b>	<b>42,643,374,612</b>		
2	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100%	1. 70,3 2. 91,1	19,825,777,411	20,844,062,371	1,018,284,960.00
2	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	16,279,071,995	18,807,982,251	2,528,910,256.00
2	1	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang	93 Orang	16,279,071,995	18,686,242,251.00	2,407,170,256.00
2	1	1	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	0	121,740,000.00	121,740,000.00
2	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian terlaksana	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	0%	199,599,000	0	(199,599,000.00)

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11		
2	1	1	2.	05	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	0 Orang	199,599,000	0	(199,599,000.00)
2	1	1	2.	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase adminstrasi umum terlaksana	Percentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	770,822,856	236,918,400	(533,904,456.00)
2	1	1	2.	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	26,461,000	7,308,000.00	(19,153,000.00)
2	1	1	2.	06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	163,685,000	102,338,400.00	(61,346,600.00)
2	1	1	2.	06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	104,186,000	39,902,000.00	(64,284,000.00)
2	1	1	2.	06	9	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	12 Laporan	476,490,856	87,370,000.00	(389,120,856.00)

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11	
					Konsultasi SKPD	Konsultasi SKPD							
2	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	100%	758,104,000	147,680,000	(610,424,000.00)
2	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	155,172,000	0	(155,172,000.00)
2	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	14 Unit	117,040,000	147,680,000.00	30,640,000.00
2	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0 Unit	485,892,000	0.00	(485,892,000.00)
2	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	807,756,560	770,828,720	(36,927,840.00)

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Selisih			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11			
2	1	1	2.	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	464,335,200	443,035,200.00	(21,300,000.00)		
2	1	1	2.	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	343,421,360	327,793,520.00	(15,627,840.00)		
2	1	1	2.	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	100%	100%	1,010,423,000	880,653,000	(129,770,000.00)	
2	1	1	2.	09	1	Penyedia jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Penyedia jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44,540,000	41,380,000.00	(3,160,000.00)	
2	1	1	2.	09	2	Penyedia jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan	Penyedia jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34 Unit	33 Unit	813,003,000	761,223,000.00	(51,780,000.00)	

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11	
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
2	1	1	2. 09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	96 Unit	148,080,000	78,050,000.00	(70,030,000.00)
2	1	1	2. 09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit	0 Unit	4,800,000	0.00	(4,800,000.00)
2	1	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	100%	100%	403,752,500	307,949,000	(95,803,500.00)
2	1	2	2. 01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan	Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan	100%	100%	403,752,500	307,949,000	(95,803,500.00)
2	1	2	2. 01	6	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muat RPPLH kabupaten/kota dan	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muat RPPLH kabupaten/kota dan	1 Dokumen	1 Dokumen	403,752,500	307,949,000.00	(95,803,500.00)

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11		
					mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	mengakomodir arahan RPPLH Provinsi								
2	1 1	3		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. IKA 2. IKU 3. ITH	1. Status Mutu Air 2. Status Kualitas Udara 3. Kualitas Tutupan Lahan	1. 53,42 2. 69,52 3. 88,89	1. 53,59 2. 89,62 3. 70,09	435,734,580	170,570,580	(265,164,000.00)		
2	1 1	3	2. 0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Percentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Percentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	300,906,580	110,937,080	(189,969,500.00)		
2	1 1	3	2. 01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	100,892,580	68,135,080.00	(32,757,500.00)	

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11	
2	1 1	3 01	2. 01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	200,014,000	42,802,000.00	(157,212,000.00)
2	1 1	3 03	2. 03		<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>134,828,000</b>	<b>59,633,500.00</b>	<b>(75,194,500.00)</b>
2	1 1	3 03	2. 03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang	1 Dokumen	1 Dokumen	134,828,000	59,633,500.00	(75,194,500.00)

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
					Dilaksanakan	Dilaksanakan						
2	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	70%	70%	363,453,200	107,651,800	(255,801,400.00)
2	1	6	2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/K	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/K	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	70%	70%	363,453,200	107,651,800	(255,801,400.00)

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11		
			ota	ota									
2	1	6	2. 01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen	0 Dokumen	79,319,200	0	(79,319,200.00)
2	1	6	2. 01	3	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100 Badan Usaha	100 Badan Usaha	284,134,000	107,651,800.00	(176,482,200.00)

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11	
			Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup								
2	1	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	100%	110,034,000	56,670,000	(53,364,000.00)	
2	1	8	2.01	Penyelenggaran Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaran Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaran Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah Penyelenggaran Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	3 Jumlah	3 Jumlah	110,034,000	56,670,000	(53,364,000.00)

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11	
2	1 1	8 01	2. 01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen	110,034,000	56,670,000.00	(53,364,000.00)
2	1 1	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Percentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Percentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	100	92,100,000	75,800,000	(16,300,000.00)
2	1 1	9 01	2. 01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	5 Jumlah	5 Jumlah	92,100,000	75,800,000	(16,300,000.00)
2	1 1	9	2. 01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	5 Entitas	92,100,000	75,800,000.00	(16,300,000.00)

Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11			
2	1	1	1	0		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	Percentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	90%	90%	355,420,000	222,105,000	(133,315,000.00)		
2	1	1	1	0	2.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Percentase pengaduan yang terselesaikan	Percentase pengaduan yang terselesaikan	90%	90%	355,420,000	222,105,000	(133,315,000.00)		
2	1	1	1	0	2.	01	4	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	49 Pengaduan	40 Pengaduan	171,528,000	129,495,000.00	(42,033,000.00)
2	1	1	1	0	2.	01	6	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan	2 Perkara	5 Perkara	183,892,000	92,610,000.00	(91,282,000.00)

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11		
					an yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	an yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota								
2	1 1	1 1		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	26%	26%	73,813,377,580	116,258,215,132	42,444,837,552.00		
2	1 1	1 1	2. 0 1	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	Pesentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan	1. Jumlah Sampah yang Ditangani 2. Jumlah Sampah yang Dikurangi	26%	1. 2.600 ton 2. 305.237 ton	73,813,377,580	116,258,215,132	42,444,837,552.00		
2	1 1	1 1	2. 01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	59 unit	108 unit	9,563,949,000	48,689,642,312.00	39,125,693,312.00	
2	1 1	1 1	2. 01	9	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi	148 unit	140 Unit	14,320,373,400	19,218,630,400.00	4,898,257,000.00	

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11	
					sampah	sampah	dan terpelihara dengan baik	dan terpelihara dengan baik					
2	1 1	1 1	2. 01	12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	310,037 Ton	310,037 Ton	47,895,819,040	46,554,631,520.00	(1,341,187,520.00)
2	1 1	1 1	2. 01	18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	2 Laporan	1,131,104,600	1,198,722,860.00	67,618,260.00
2	1 1	1 1	2. 01	19	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	2600 Ton	2600 Ton	902,131,540	596,588,040.00	(305,543,500.00)
<b>UPTD LABORATORIUM</b>										<b>1,172,767,760</b>	<b>738,523,760</b>	<b>(434,244,000.00)</b>	
2	1 1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100%	1. 70,3 2. 91,1	1,096,892,760	662,648,760	(434,244,000.00)
2	1 1	1	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase adminstrasi Kepegawaian terlaksana	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	0%	297,460,000	148,924,000	(148,536,000.00)

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10-9-8	11			
2	1	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	297,460,000	148,924,000.00	(148,536,000.00)	
2	1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase adminstrasi umum terlaksana	Percentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	100,440,160	32,639,160	(67,801,000.00)	
2	1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	9,345,160	4,793,160.00	(4,552,000.00)	
2	1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36,855,000	27,846,000.00	(9,009,000.00)	
2	1	1	1	2.06	9	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	0 Laporan	54,240,000	0.00	(54,240,000.00)	
2	1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Percentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	100%	446,107,000	231,240,000	(214,867,000.00)	

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11		
2	1	1	2.	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 unit	8 Unit	446,107,000	231,240,000.00	(214,867,000.00)
2	1	1	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	Percentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	Percentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	194,155,600	194,155,600	0.00
2	1	1	2.	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	98,395,600	98,395,600.00	0.00
2	1	1	2.	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	95,760,000	95,760,000.00	0.00
2	1	1	2.	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia	Percentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	100%	100%	58,730,000	55,690,000	(3,040,000.00)

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11		
2	1 1	1 1	2. 09	2	Penyedia jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyedia jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	58,730,000	55,690,000.00	(3,040,000.00)	
2	1 1	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. IKA 2. IKU 3. ITH	1. Status Mutu Air 2. Status Kualitas Udara 3. Kualitas Tutupan Lahan	1. 53,42 2. 69,52 3. 88,89	1. 53,59 2. 89,62 3. 70,09	75,875,000	75,875,000	0.00	
2	1 1	3	2. 01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	75,875,000	75,875,000	0.00	
2	1 1	3	2. 01	9	Pengoperasian dan Pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan Kabupaten/Kota	Pengoperasian dan Pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	10 Unit	10 Unit	51,457,000	51,457,000.00	0.00	

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11	
2	1	3	2.01	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	10 Laporan	10 Laporan	24,418,000	24,418,000.00	0.00
<b>UPTD TPA TELAGA PUNGGRU</b>													
2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100%	1. 70,3 2. 91,1	3,004,976,160	3,006,296,160	1,320,000.00
2	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase adminstrasi umum terlaksana	Persentase Pemenuhan umum Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	49,680,000	53,820,000	4,140,000.00
2	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	49,680,000	53,820,000.00	4,140,000.00
2	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	2,955,296,160	2,952,476,160	(2,820,000.00)
2	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,955,296,160	2,952,476,160.00	(2,820,000.00)

Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2	1	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Percentase Pengurangan Sampah	Percentase Pengurangan Sampah	26%	26%	3,452,440,000	5,450,227,500	1,997,787,500.00	
2	1	1	2.01	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	Pesentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan	1. Jumlah Sampah yang Ditangani 2. Jumlah Sampah yang Dikurangi	26%	1. 2.600 ton 2. 305.237 ton	3,452,440,000	5,450,227,500	1,997,787,500.00	
2	1	1	2.01	9	Pengeoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	Pengeoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	7 Unit	7 Unit	3,452,440,000	5,450,227,500.00	1,997,787,500.00	
<b>Total</b>										<b>103,029,833,191</b>	<b>147,238,071,303</b>	<b>44,208,238,112</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Catatan Penting**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, diantaranya yaitu :

1. Penanganan dan Pengelolaan Sampah Laut. Penanganan sampah dan pengelolaan sampah laut yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
  - a. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan dampak buruk sampah laut terhadap ekosistem, yang menyebabkan perilaku pembuangan sampah sembarangan masih sering terjadi.
  - b. Belum memadainya infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai, sehingga sistem pengumpulan, pengolahan dan daur ulang sampah di wilayah pesisir dan laut masih terbatas.
  - c. Masih tingginya penggunaan plastik sekali pakai yang sulitterurai, sehingga volume sampah plastik di laut terus meningkat.
  - d. Peran serta masyarakat dan dunia usaha yang belum maksimal, serta kurangnya program edukasi dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.
2. Rencana Batam bebas sampah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
  - a. Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, terutama kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum hukum terkait pengelolaan sampah, sehingga masyarakat belum sepenuhnya menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
  - b. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
  - c. Masih adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar yang tersebar di berbagai kecamatan, yang menunjukkan kurangnya kesadaran dan pengawasan dalam pembuangan sampah.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik sampah di darat maupun di laut di sebabkan oleh faktor-faktor berikut :
  - a. Kurangnya kesadaran lingkungan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah secara benar dan dampak negatif dari pencemaran sampah terhadap kesehatan dan lingkungan.
  - b. Masih terbatasnya fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
  - c. Belum adanya regulasi atau sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku pembuangan sampah ilegal.

#### **4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tahun 2021-2026, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

#### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Adapun rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan Batam Bebas yang belum berjalan maksimal pada tahun 2025, meliputi beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Penambahan armada armada pengangkutan sampah
2. Peningkatan program edukasi dan sosialisasi perihal pelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat
3. Pembentukan dan pengembangan Tempat Pembangunan Sementara (TPS) di sejumlah titik strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan mengurangi pembuangan sampah liar

Selanjutnya rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik sampah di darat maupun di laut di Kota Batam meliputi beberapa langkah strategis yaitu:

1. Pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pengelolaan tempat umum
2. Pemberdayaan komunitas tingkat RT/RW melalui sosialisasi pengelolaan sampah mandiri yang melibatkan pelatihan kader lingkungan
3. Pengembangan dan optimalisasi bank sampah sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyetor sampah yang masih bernilai ekonomis

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

**WALI KOTA BATAM**

**AMSAKAR ACHMAD**

